

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah. Kegiatan-kegiatan ekonomi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Penyerapan tenaga kerja baru oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan berdampak signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha harus siap dan mengantisipasi perkembangan tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah total UMKM di Indonesia hampir 60 juta UMKM. Dari jumlah tersebut, 98,74% merupakan usaha mikro, kemudian sekitar 1,15% merupakan pelaku usaha kecil dan 0,10% merupakan usaha menengah .

Di kutip dari Ekonomi.Okezone.com, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Namun tidak dipungkiri bahwa hadirnya pandemi *Covid-19* membuat hampir seluruh UMKM terdampak. Bahkan berdasarkan Survei Komunitas UMKM Naik Kelas bulan April 2020, 83 % UMKM berpotensi gulung tikar.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggerakkan sektor riil, karena UMKM berfokus pada pengembangan industri rumah tangga dan mendorong faktor produksi dan konsumsi. Sektor riil dapat menghasilkan barang serta jasa yang dapat dinikmati baik secara langsung maupun tidak langsung.

Awal tahun 2020, dunia sedang dilanda pandemi *Covid-19* yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2)* atau yang lebih dikenal dengan virus Corona. Kasus pertama di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020, walaupun beredar kabar bahwa sebelum itu *Covid-19* telah masuk di Indonesia (detik.com, 2020). Hingga saat ini kasus *Covid-19* di Asia Tenggara masih di duduki Indonesia, tercatat per tanggal 20 Februari 2021 dengan jumlah kasus mencapai 1.334.634 dengan angka kesembuhan 1.142.703 dan angka kematian 36.166 (covid19.do.id, 2020).

UMKM berkontribusi sebesar 60,3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap total 97% tenaga kerja dan menyediakan 99% lapangan kerja di Indonesia. Oleh karena itu, UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (Putra & Widajantie, 2021)

Pemerintah selain melakukan kebijakan untuk penanganan medis, juga membuat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Kementerian Keuangan RI, 2020). Kebijakan PEN diturunkan dalam berbagai program di antaranya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), program sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Pra- Kerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Banpres Produktif UMKM, Subsidi Gaji, dan Diskon Listrik.

Program pemerintah yaitu “Kartu Sembako Murah” adalah salah satu bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM. Dimana pemerintah memberikan wadah dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak *Covid-19*. Pemerintah menggelontorkan Dana sebanyak 43,6 Triliun untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jumlah besaran dana Rp. 200.000/KPM/Bulan dalam bentuk uang elektronik yang di salurkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dilansir dari pada <https://indonesiabaik.id/infografis/kartu-sembako-rakyat-mudah-dapat-bahan-pangan-murah> terakhir di akses pada 01 Februari 2022

Uang elektronik tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang telah ditentukan di Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong). Pemerintah merangkul para pelaku UMKM untuk bekerja dengan program pemerintah dimana syarat untuk mendaftar cukup dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk, *fotocopy* Kartu Keluarga, *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak, *fotocopy* rekening BNI, Surat Keterangan Usaha, Surat Penghasilan Usaha, foto tempat usaha dan Surat Rekomendasi Dinas Sosial.

Pemerintah daerah melalui Bank BNI sebagai Bank terkait penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), program sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) merangkul para pelaku UMKM turut serta bekerja sama membantu penyaluran bantuan sosial. Dalam hal ini pemerintah memberikan wadah kepada para UMKM untuk Kembali bangkit dari efek *Covid-19* yang mengguncang sektor perekonomian.

Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada warga yang terkena pandemi *Covid-19* harus tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Sebagaimana data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial di Kecamatan Tanjung priok:

Tabel 1. 1
Daftar Keluarga Penerima Manfaat

No	Kelurahan	Jumlah KPM
1	Kebon bawang	569
2	Tanjung priok	508
3	Warakas	404
4	Sunter Agung	397
5	Papanggo	386
6	Sunter Jaya	353
7	Sungai Bambu	310

Sumber, Data Walikota Jakarta Utara 2020

Pemerintah membentuk program bantuan selama *Covid-19* mempunyai tujuan yang ingin diraih seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk melihat indikator tercapainya tujuan dari program bansos tersebut dalam membantu masyarakat rentan yang terdampak *Covid-19* dapat diukur melalui implementasi pelaksanaan program bansos tersebut.

Kelurahan kebon bawang adalah kelurahan dengan Keluarga penerima Manfaat (KPM) paling banyak di kecamatan tanjung priok. Para UMKM terpilih akan melayani sekitar 569 KPM dalam kurun waktu satu minggu. Pencatatan Laporan keuangan pada UMKM yang bekerja sama dengan pemerintah tentu memiliki nilai penting, selain untuk mengetahui keuntungan. Laporan keuangan mampu menjadi bahan evaluasi UMKM maupun Pemerintah apakah sudah sesuai yang dengan ketentuan pemerintah pusat serta meminimalisir resiko hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengan bantuan sebanyak Rp. 200.000 para KPM dapat membelanjakan bahan pokok Seperti . seperti Beras, Telur , Ayam , Kacang-kacangan dan Tepung. Merek bahan pokok yang digunakan adalah merek yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah memiliki peran besar dalam Bantuan Sosial ini. Pemerintah membuat perekonomian di sektor kecil tetap bekerja. Begitu juga dengan

pencatatan keuangan yang dilakukan UMKM tersebut. Baiknya para UMKM wajib melaporkan tentang penjualan yang terjadi di toko tersebut. Akan tetapi karena beberapa kendala UMKM tidak melakukan hal tersebut.

Para UMKM terpilih merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Walau keuntungan yang di dapatkan sedikit. tetapi kuantitas yang besar membuat UMKM lebih hidup di saat pandemi .

Setiap usaha tentu harus memiliki pencatatan administrasi, Catatan administrasi berupa laporan keuangan. Masih banyak UMKM yang belum melakukan Menyusun laporan keuangan sesuai standar. Rata -rata pencatatan laporan keuangan disusun secara sederhana. Padahal dengan menyusun laporan

keuangan para usahawan dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang baik

Namun, permasalahan yang kerap timbul dalam kegiatan UMKM yaitu, masih banyak dari pelaku usaha tersebut yang belum memperhatikan masalah pengelolaan pendanaan. Faktor kunci keberhasilan ataupun kegagalan ada pada pengelolaan pendanaan yang baik. Metode praktis dan manjur dalam pengelolaan dana pada UMKM adalah dengan menerapkan akuntansi dengan baik. Dengan demikian, akuntansi menjadikan UMKM dapat memperoleh berbagai informasi keuangan dalam menjalankan usahanya

Akan tetapi, pada kenyataannya banyak para pelaku UMKM di Indonesia tidak menyelenggarakan dan menjalankan akuntansi dalam mengelola usahanya, Hal ini di sebabkan para pelaku usaha tidak mengerti apa sebenarnya akuntansi dalam mengelola usahanya sehingga mereka tidak tahu pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi usaha mereka. Dapat disimpulkan para pelaku UMKM buta akan akuntansi .

Pengusaha entitas kecil dan menengah memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan pada usahanya. Masih banyak pengusaha kecil yang belum melakukan pencatatan laporan keuangan dengan baik. Bahkan masih banyak yang tidak melakukan pencatatan sama sekali.

Kurangnya pengetahuan dalam pencatatan adalah dari faktor jenjang pendidikan. Pengetahuan tentang akuntansi dapat diperoleh dari pendidikan formal dan sumber-sumber informal. Pendidikan formal ini seperti program universitas, atau mengikuti kelas pelatihan di luar. Untuk sumber informasi sendiri tidak ada sulitnya di masa sekarang.

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang sesuai standar. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengesahkan Standar akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada 24 Oktober 2016. Diharapkan SAK EMKM membantu para pelaku usaha kecil dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berdasar kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. SAK EMKM ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018.

Standar ini memiliki tiga komponen, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini memudahkan para UMKM dalam menyusun laporan keuangan. SAK EMKM adalah bentuk sederhana dari SAK ETAP, dari segi teknis SAK EMKM murni menggunakan biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat asset dan liabilitasnya sebesar harga perolehan. Oleh karena itu SAK EMKM diterbitkan untuk memudahkan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO,KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM YANG TERDAFTAR E-WARONG DI KELURAHAN KEBON BAWANG)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas, maka pembahasan akan dititik beratkan pada masalah pokok yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Laporan keuangan yang diterapkan UMKM di kelurahan kebon bawang?
2. Apakah para UMKM Menyusun laporan keuangan sesuai Standard Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil dan menengah?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan:

Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pengusaha Toko yang terdaftar pada (E-WARONG) di kelurahan kebon bawang

1. Untuk mengetahui pengelolaan laporan keuangan yang diterapkan UMKMdikelurahan kebon bawang?
2. Untuk mengetahui apakah penyusun laporan keuangan UMKM telah sesuai SAK EMKM?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi UMKM

Penelitian ini berguna untuk menjadi bahan masukan tentang Penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Bagi Pemerintah :

Penelitian ini berguna sebagai evaluasi terkait pendistribusian bantuan melalui UMKM.

3. Bagi Praktisi

Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan informasi akuntansi, dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang akan mendirikan UMKM.